

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR IZIN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**MUH FAUZY MUSTARI**

**B 121 13 331**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR IZIN USAHA  
PARIWISATA DI KABUPATEN PINRANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

disusun dan diajukan oleh

**MUH FAUZY MUSTARI**

**B 121 13 331**

kepada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR IZIN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH FAUZY MUSTARI**

**B121 13 331**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu 16 Agustus 2017  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.si.**  
**NIP. 19640824 199103 2 002**

**Sekretaris,**



**Ariani Arifin, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830605 200604 2 003**

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610607 198601 1 003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

NAMA : MUH FAUZY MUSTARI

NIM : B 121 13 331

PRODI : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL : *"Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Izin Usaha Pariwisata di  
Kabupaten Pinrang"*

Telah di periksa dan di setujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin.

MAKASSAR, Mei 2017

Pembimbing I



Prof. Marwati Riza, S.H., M.Si  
NIP. 19640824 199103 2 002

Pembimbing II



Ariani Arifin, S.H., M.H  
NIP. 19830605 200604 2 003



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH FAUZY MUSTARI  
Nomor Pokok : B12113331  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2017

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## **ABSTRAK**

**Muh Fauzy Mustari (B12113331)**, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang”**. Di bawah bimbingan Marwati Riza selaku Pembimbing I dan Ariani Arifin selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dari responden yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut, (1) Pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang masih belum optimal sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan oleh beberapa pihak yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata. (2) Faktor penegakan hukum, belum ada peraturan khusus yang mengatur tugas dan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang yang dapat mengakomodir pelaku usaha pariwisata mulai dari tahap perizinan, pengendalian, pengawasan, sampai dengan pembinaan.

## **ABSTRACT**

**Muh Fauzy Mustari (B12113331), entitled "Juridical Review of Tourism Business License Procedures in Pinrang District". Under the guidance of Marwati Riza as Supervisor I and Ariani Arifin as mentor II.**

This study aims to know two things. First, to find out how the implementation of tourism business licensing process in Pinrang Regency based on the Regional Regulation of Pinrang Regency Number 1 Year 2016 About Tourism Business Certificate. Second, to know what factors influencing the process of tourism business licensing in Pinrang Regency based on the Regional Regulation of Pinrang Regency Number 1 Year 2016 About Tourism Business Certificate.

This research was conducted at the Office of Tourism and Sports Pinrang District, Office of Investment and Integrated Services One Door Pinrang District. Types of data sources in this study are primary data which is a direct interview of respondents associated with this writing and secondary data which is data obtained indirectly derived from legislation, literature, reports, books and scientific writings related With author's discussion.

From the research conducted, the authors get the following research results, (1) Supervision of the activities of tourism business in Pinrang Regency is still not optimal, causing arbitrariness by some parties who will organize tourism business. (2) Law enforcement factors, there are no specific regulations governing the tasks and authorities of Pinrang Regency Tourism Office that can accommodate tourism business actors starting from the licensing, controlling, supervising, up to coaching stage.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang memiliki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar, baik nikmat iman, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap prosedur Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten” untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya sampai kelak akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Ayahanda Mustari Habbas dan Ibunda Norma.S.ip,M.si tercinta yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran telah membesarkan dan mendidik kami untuk dapat menempuh pendidikan yang layak agar tercapai cita-cita.
2. Kepada saudaraku tercinta Alm. Muh Fitransyah yang telah membantu baik moril maupun materiil selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajaran struktural di Rektor Universitas Hasanuddin;



4. Ibu Prof. Dr. Farida Patitinggi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara , beserta Dosen di Bagian Hukum Administrasi Negara;
6. Ibu Prof.Dr. Marwati Riza, S.H.,M.Si. . Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ariani Arifin S.H., M.H. Selaku Pembimbing II, disela-sela rutinitasnya namun tetap meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, dorongan, saran dan arahan sejak rencana penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang, S.H., M.H.,DFM., Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., Bapak Romi Librayanto S.H., M.H. . selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
8. Bapak-bapak/ibu-ibu staf pengajar (Dosen), seluruh staf pegawai akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pengarahan selama proses perkuliahan.
9. Saudara Iskandar S.T., Mas'ud S.HI.,Dzaral Al Ghifari.S.H., Yudi Hermawan.S.H, Ardin Fajrin.S.H. atas dukungan moril dan materil
10. Saudara dan Saudari Zuryat Fadel Rachmatullah S.H., Andi

Mulya Tenri Jaja S.H., Masyita Rahman S.H. atas dukungan  
moril dan materil

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena keterbatasan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenaan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya.

WassalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Agustus 2017

Muh Fauzy Mustari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Perizinan .....	16
1. Pengertian Perizinan .....	16
2. Unsur-unsur perizinan. ....	17
3. Fungsi perizinan. ....	18
4. Bentuk dan isi perizinan .....	19
5. Tujuan perizinan .....	22
B. Tinjauan Umum Pariwisata .....	23
1. Pengertian Pariwisata .....	23
2. Usaha Pariwisata .....	24
3. Jenis Usaha Pariwisata. ....	24
C. Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang .....	27
D. Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang.....	30
E. Birokrasi Pelayanan Publik.....	35
	x

<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. lokasi penelitian.....	41
C. Jenis dan sumber bahan hokum .....	42
D.Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pelaksanaan proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang .....	46
B. Faktor yang mempengaruhi proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang .....	57
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akhir-akhir ini kegiatan wisata di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terbukti dengan meningkatnya wisatawan mancanegara mengunjungi kawasan pariwisata di Indonesia semakin meningkat. Dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia November 2016 naik 19,98 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 835,41 ribu kunjungan menjadi 1,00 juta kunjungan<sup>1</sup>. Tidak hanya itu, wisatawan lokal pun sangat antusias untuk mengunjungi tempat-tempat pariwisata yang tersedia. Hal ini tentu menjadi catatan positif bagi pemerintah Indonesia sekaligus menjadi tantangan ke depannya untuk lebih meningkatkan kawasan pariwisata di Indonesia. Selain itu, dampak dari peningkatan kunjungan tersebut tentunya menjadi keuntungan bagi para pengusaha pariwisata yang ada di Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan memberikan pengertian mengenai pariwisata yakni :

*“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1326> diakses pada 15 Februari 2017 pada pukul 00.09 wita.

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Dalam melakukan usaha pariwisata bagi pihak swasta, terlebih dahulu harus mengantongi izin sebelum mengoperasikan kawasan wisata tersebut. Artinya pihak swasta harus memperoleh izin dari pihak pemerintah atau pemerintah daerah pada bidang perizinan pariwisata untuk melegalkan tempat usaha pariwisatanya. Hal ini dimaksudkan agar pihak swasta mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha yang menyebutkan kegunaan dari Pendaftaran Usaha Pariwisata yakni:

*(a.)Menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata; (b.)Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan (c.)Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata<sup>3</sup>.*

Secara umum, perizinan memiliki fungsi pembinaan dalam arti bahwa dengan diberikannya izin usaha oleh pemerintah, maka pelaku usaha dapat berpraktik atau beroperasi melakukan usahanya<sup>4</sup>. Hal itu mengisyaratkan bahwa izin usaha merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang diberikan kepada para pelaku usaha dengan maksud untuk mengendalikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Selain itu izin juga berfungsi sebagai

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 195-197.

pengendali dan mempunyai fungsi untuk merekayasa masyarakat<sup>5</sup>. Olehnya itu keberadaan izin menjadi sangat penting untuk menertibkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam bidang pariwisata terdapat 2 jenis izin pariwisata yakni:

1. Pendaftaran usaha daya tarik wisata; dan
2. Pendaftaran usaha kawasan usaha Pariwisata.

Sementara itu salah satu pengaturan mengenai perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga yang berbunyi :

*“Untuk kepentingan pengawasan, pengendalian dan pembinaan maka setiap usaha pariwisata yang dikelola oleh pihak swasta yang berada di Daerah dengan menarik retribusi harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati”<sup>6</sup>.*

Lebih lanjut terkait pengaturan perizinan, pemerintahan Kabupaten Pinrang membentuk suatu badan melalui Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang yang bertugas dalam melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dalam urusan pemerintahan

---

<sup>5</sup>HR Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 208.

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga.

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati<sup>7</sup>.

Pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang ini tentunya memiliki peranan penting dalam memberikan perizinan kepada pelaku usaha yang berimplikasi kepada kemajuan daerah melalui sektor retribusi daerah. Hal ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah Kabupaten Pinrang. Dalam memberikan pelayanan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik dalam lampiran Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yakni<sup>8</sup>:

1. Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

---

<sup>7</sup>Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<sup>8</sup>Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.



5. Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehinggatercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktusesuai dengan standar pelayanan.
12. Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Dalam kaitannya, pelayanan pemberian izin usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang Pasal 17 ayat (2) huruf d yakni:

*“Memeriksa,meneliti, dan mengotorisasi penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan I meliputi : Pendidikan, kesehatan, pariwisata, sosial, dan kebudayaan”<sup>9</sup>.*

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu perizinan khususnya usaha pariwisata yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membuka usaha pariwisata harus memperhatikan asas-asas tersebut yang ada di atas. Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang merupakan dinas yang berwenang dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian serta pembinaan objek daya tarik wisata, sarana pariwisata dan upaya pengembangan pemasaran potensi pariwisata di wilayah Kabupaten Pinrang.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, penyelenggaraan usaha pariwisata yang termasuk dalam jenis usaha daya tarik wisata berada di bawah naungan pemerintah daerah dalam hal ini di Kabupaten Pinrang adalah Dinas Pariwisata dan Olahraga. Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang merupakan Dinas Teknis yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan kajian teknis menyangkut kelayakan penyelenggaraan Pariwisata.

Usaha pariwisata dalam jenis usaha daya tarik wisata seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu,

---

<sup>9</sup>Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang Pasal 17 ayat (2)

penyelenggaraan usaha pariwisata harus memiliki Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP. Penerbitan izin TDUP dilakukan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. Namun untuk dapat menerbitkan izin TDUP, Badan Perizinan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang.

Dalam proses pelaksanaan perizinan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten Pinrang sebagaimana ditentukan pada pasal 2 yang bertujuan untuk<sup>10</sup> :

- a. menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisatanya.
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata.
- c. Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Dalam melakukan pendaftaran usaha pariwisata, pelaku usaha pariwisata harus melalui tahapan yakni:

- a. permohonan pendaftaran;
- b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. penerbitan TDUP.

---

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten Pinrang

Dalam permohonan pendaftaran usaha pariwisata, pemohon harus melengkapi persyaratan yakni:

- 1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- 2) Pengajuan permohonan disertai dengan dokumen persyaratan.
- 3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. usaha perseorangan:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. fotokopi NPWP; dan
    3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
    1. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
    2. fotokopi NPWP; dan
    3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    4. Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud , khusus untuk:
      - a) usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
      - b) usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;

- c) usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
- d) usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
- e) usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
- f) usaha wisata tirta sub jenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyelenggara dalam hal perizinan di wilayah Kabupaten Pinrang yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin ditentukan oleh kantor lembaga teknis pemerintah yaitu, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Pinrang ditentukan dalam peraturan perizinan yakni terkait dengan Izin Usaha Pariwisata. Pemberian izin usaha pariwisata diberikan berdasarkan

pada permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Melalui izin, pemerintah memberikan dua hal yaitu perlindungan dan fasilitas, sebelum pelaku usaha pariwisata yang ingin mengadakan kegiatan usaha pariwisata, langkah awal yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan izin usaha kepada pemerintah atau kepala instansi/dinas yang terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang disertai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Terkait perolehan perizinan usaha pariwisata, yang dimana di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam peraturan tersebut paragraf 1 seksi pelayanan perizinan dan non perizinan I pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), menyebutkan yang meliputi salah satunya adalah pariwisata tetapi tidak menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara atau syarat perizinan khususnya usaha pariwisata.

Namun dapat dilihat, terkait pelayanan perizinan mengenai rincian tugas pelayanan perizinan dan non perizinan I disebutkan dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (3) huruf b yakni :

*“Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)”<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup>Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Organisasi dan Tata

Maka dengan aturan tersebut di atas merupakan kewenangan dan kebijakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang dalam membantu kepala daerah untuk menjalankan tugas terhadap pelayanan perizinan usaha melalui Standar Operasional Prosedur(SOP) dalam hal ini terkait perolehan izin usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar bisa mengoperasionalkan kegiatan usahanya, setiap pelaku usaha Pariwisata harus memiliki izin kegiatan usaha dalam bentuk Surat Keputusan(SK) yang di keluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, karena tanpa adanya izin usaha, kegiatan usaha pariwisata dalam bentuk apapun akan dianggap sebagai bentuk usaha atau kegiatan usaha yang ilegal dan melanggar peraturan.

Fungsi utama pemberian izin usaha pariwisata berkisar pada penetapan apakah kegiatan operasional usaha pariwisata itu dapat dijalankan atau tidak. Penerbitan izin atau perpanjangan izin usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari keputusan yang dilakukan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Dalam setiap keputusan tersebut memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para pelaku usaha, yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Dalam permohonan pemberian izin usaha pariwisata, tidak semua permohonan

akan dikabulkan oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga dan DPMPTSP Kabupaten Pinrang.

Permohonan yang ditolak akan disertai oleh alasan-alasan kenapa permohonan tersebut ditolak, apakah syarat-syarat perizinan kurang lengkap atau perizinan yang tidak sesuai dengan semestinya, atau izin pembangunan yang menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi proses pembangunan tempat pariwisata yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu kelengkapan izin maupun pembangunan yang menyalahi aturan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat beberapa tempat rekreasi sebagai objek wisata, sebagaimana dalam Pasal 5 Perda No. 29 Tahun 2011 Kabupaten Pinrang menyebutkan obyek Wisata di Daerah terdiri dari<sup>12</sup>:

1. Permandaian Air Panas Sulili;
2. Permandian Air Terjun Kali Jodoh;
3. Pantai Kanipang;
4. Pantai DewataeWakka;
5. Pantai Waetuo;
6. Kolam Renang Besar Sulili; dan
7. Permandian Alam Batu Pandan.

Selanjutnya, jumlah objek wisata di Kabutaten Pinrang bertambah jumlahnya dari apa yang tercantum dalam perda di atas yang dimana

---

<sup>12</sup>Pasal 5 Perda No. 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Kab. Pinrang



sangat memiliki keterkaitan terhadap pelayanan, pelaksanaan dan pengawasan dari pemerintah daerah untuk mengakomodir aktivitas dalam masyarakat khususnya pelayanan perizinan usaha pariwisata. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah kabupaten pinrang terhadap pelayanan, pelaksanaan, dan pengawasan terkait perizinan usaha pariwisata dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu keberadaan objek wisata yang teridentifikasi adalah objek wisata Karomba yang terletak di Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Namun berdasarkan informasi yang beredar dan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, kawasan wisata tersebut menjadi polemik bahwa keberadaan objek wisata tersebut dianggap melanggar aturan dan belum memiliki izin usaha pariwisata untuk beroperasi<sup>13</sup>.

Yang kemudian timbulnya kekhawatiran terdapat beberapa keberadaan objek pariwisata yang juga beropersi tanpa memiliki adanya izin dari pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini, seharusnya adanya pengawasan yang optimal dari pemerintah daerah terkait kegiatan usaha pariwisata sehingga setiap usaha pariwisata wajib memiliki sebuah izin dari pemerintah daerah Kabupaten Pinrang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan uraian masalah di atas, olehnya itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan proses perizinan usaha pariwisata dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses perizinan usaha

---

<sup>13</sup>[www.Tribun Timur.com](https://www.TribunTimur.com), Diakses pada 22 Desember 2016, <https://polemik.wisata.karomba.pinrang>

pariwisata di Kabupaten Pinrang. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang Hukum Administrasi Negara, dalam hal pelaksanaan proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang.

- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti untuk menambah literatur bagi dunia akademis.

## 2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan para pengambil kebijakan dan para pelaksana dibidang Hukum Administrasi Negara, khususnya menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi-selatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perizinan**

##### **1. Pengertian Perizinan**

Berikut pandangan mengenai izin, Pengertian izin dari pendapat yang dikemukakan beberapa pakar berikut di bawah ini:

a. SjachranBasah

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto, berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>.

b. Bagir Manan

Menyebutkan bahwa izin berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum di larang<sup>15</sup>.

c. M.M. Van Pragg

Izin merupan suatu tindakan hukum sepihak (*eenzijdige handeling*)<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup>Op. Cit. HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 198.

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm.199.

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 200.

d. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge

Mendefenisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk<sup>17</sup>.

## **2. Unsur-Unsur Perizinan**

Ada beberapa unsur-unsur dalam perizinan yakni<sup>18</sup>:

- a. Instrumen yuridis, dalam negara hukum modern tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah di berikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan.
- b. Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus di dasarkan pada wewenang yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Organ pemerintah, organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

---

<sup>17</sup>Op. Cit. Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik*, hlm. 170.

<sup>18</sup>Op. Cit. HR Ridwan, hlm. 202-208.

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi pemerintahan yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh di keluarkan oleh organ pemerintahan.

- d. Peristiwa konkret, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya (dinas pendapatan daerah, dinas kesehatan hewan, dinas peternakan, bagian perekonomian, bagian kesejahteraan rakyat dan sebagainya).
- e. Prosedur dan persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

### **3. Fungsi Perizinan**

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Izin digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti

cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan.

Adapun mengenai fungsi perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari fungsi izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin pembangunan.
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

#### **4. Bentuk dan Isi Perizinan**

Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Demikianlah dalam izin dinyatakan organ pemerintahan mana yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. Selanjutnya

---

<sup>19</sup>Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, Op.cit, Hal 30

dinyatakan untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari pemberiannya. Kalau izin diberikan dengan syarat, syarat-syarat ini di cantumkan pula dalam ketetapan perizinan. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut<sup>20</sup>:

a. Organ yang berwenang.

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya biasanya dari kepala surat dan penandatangan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.

b. Yang dialamatkan.

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

c. Dictum.

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

---

<sup>20</sup>Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, Op.cit, Hal 35



d. Ketentuan-ketentuan.

Pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat. Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi, memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan, pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu, tempat dan cara lain. Terdapat syarat, dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti, dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberi alasan.

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan mungkin saja juga merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari. Dari uraian diatas jelas bahwa, inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah pada tata

cara dan prosedur perizinan. Untuk itu maka isi regulasi dan deregulasi haruslah memenuhi nilai-nilai yang sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas. Dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak (izin) dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang berhak.

## **5. Tujuan Perizinan**

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang di anjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkrit. Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang di hadapi. Keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni didaerah padat penduduk).

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm.209

e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank een horecawe*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Sementara Ateng Syafrudin mengatakan izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan di mana hal yang dilarang menjadi boleh. Olehnya itu izin bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang dilarang. Selain itu izin juga sebagai alat pengendali terhadap masyarakat dalam hal berkegiatan<sup>22</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Pariwisata**

### **1. Pengertian Pariwisata**

Secara Etomooigi pariwisata berasal dari dua kta yaitu “pari” yang berarti banyak/berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti “pergi”. Didalam kamus besar indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, hlm. 91.

<sup>23</sup><http://assharrefdino.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017 jam 11.30 WITA

Sedangkan Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa:<sup>24</sup>

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

## **2. Usaha Parawisata**

Secara umum Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan/mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa:<sup>26</sup>

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

## **3. Jenis Usaha Pariwisata**

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan<sup>27</sup> menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha Pariwisata meliputi:

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

<sup>25</sup> <http://totoksuharto.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017 jam 11.30 WITA

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

- a. Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b. Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- c. Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- d. Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumentasi perjalanan.
- e. Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
- f. Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok

---

<sup>27</sup>Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

wisata, bumi perkemahan, pesinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- i. Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- j. Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k. Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- l. Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa

lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

m.Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

### **C. Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang**

Usaha pariwisata sebagai salah satu sektor dalam menjalankan pemerintahan, maka perlunya pelaku usaha memperoleh perizinan usaha pariwisata dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu pengusaha pariwisata yang ingin membuka usaha pariwisata terlebih dahulu harus memiliki izin. Untuk memenuhi hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Pinrang merupakan perangkat daerah yang bertugas untuk memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat khususnya izin usaha pariwisata yang dibawah oleh pemerintah daerah Kabupaten Pinrang.

Namun sebelum memperoleh izin, pelaku usaha perlu memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang(DISPAOR). Oleh

karena itu, pengusaha pariwisata yang ingin membuka usaha pariwisata terlebih dahulu harus memiliki izin. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2016 Tentang tanda daftar Usaha Pariwisata menegaskan bahwa maksud dari pendaftaran usaha pariwisata yaitu:

1. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi pengusaha; dan
2. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2016 Tentang tanda daftar Usaha Pariwisata menyebutkan usaha pariwisata meliputi:<sup>28</sup>

1. daya tarik wisata;
2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi wisata;
4. jasa perjalanan wisata;
5. jasa makanan dan minuman;
6. penyediaan akomodasi;
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;

---

<sup>28</sup>Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2016 Tentang tanda daftar Usaha Pariwisata



11. jasa pramuwisata;

12. wisata tirta; dan

13. spa.

Kemudian menurut Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Pasal 9 ayat (1) terkait pengembangan usaha dan pemasaran kepariwisataan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian serta pembinaan objek daya tarik wisata, sarana pariwisata dan upaya pengembangan potensi pariwisata. Dinas Pariwisata dan Olahraga merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kabupaten Pinrang dalam bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pinrang. Terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran usaha pariwisata yang di keluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga di atur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 mengenai rincian tugas dalam pengembangan usaha dan pemasaran kepariwisataan disebutkan bahwa :<sup>29</sup>

*“Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)”*

Dengan demikian dapat dikatakan Dinas Pariwisata dan Olahraga menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) salah

---

<sup>29</sup>Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Pinrang

satunya untuk mengatur persyaratan dan tata cara perolehan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi pelaku usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No 1 Tahun 2016 tentang Tandan Daftar Usaha Pariwisata , yang kemudian sebagai legitimasi untuk mendapatkan izin usaha pariwisata di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah kabupaten Pinrang dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang**

Pendaftaran Usaha Pariwisata di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut diatur di dalam Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.

Mekanisme untuk mengajukan permohonan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata lebih lanjut di atur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, yaitu:

1. Permohonan pendaftaran;
2. Pemeriksaan berkas permohonan; dan
3. Penerbitan TDUP.

Permohonan Pendaftaran izin usaha kemudian diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata di sebutkan dalam pasal bahwa:<sup>30</sup>

- a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- c. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a) usaha perseorangan:
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - 2) fotokopi NPWP; dan
    - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - b) . badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
    - 1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
    - 2) fotokopi NPWP; dan
    - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

---

<sup>30</sup>Pasal 21 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

- 4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
- (a) usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
  - (b) usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
  - (c) usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
  - (d) usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
  - (e) usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
  - (f) usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah kelengkapan berkas permohonan telah dipenuhi oleh calon pelaku usaha pariwisata, selanjutnya penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada

Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Selanjutnya pemeriksaan berkas permohonan kemudian diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata di sebutkan bahwa:<sup>31</sup>

- a. PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- b. Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2(dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima oleh PTSP.
- d. Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2(dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

Setelah permohonan dan pemeriksaan berkas telah dipenuhi, Selanjutnya PTSP menerbitkan TDUP berdasarkan Peraturan Menteri

---

<sup>31</sup>Pasal 25 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha  
Pariwisata Pasal 26 yang menyebutkan bahwa:<sup>32</sup>

- a. PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1(satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- b. TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a) Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
  - b) Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
  - c) Nama Pengusaha Pariwisata;
  - d) Alamat Pengusaha Pariwisata;
  - e) Nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
  - f) Jenis atau subjenis usaha pariwisata;
  - g) Nama usaha pariwisata;
  - h) Lokasi usaha pariwisata;
  - i) Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
  - j) Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;

---

<sup>32</sup>Pasal 26 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

- k) Nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
  - l) Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
  - m) Tanggal penerbitan TDUP; dan
  - n) Apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisatanya.

Setelah pelaku usaha telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan, maka penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan TDUP kepada Pengusaha Pariwisata dalam bentuk satu dokumen TDUP.

## **E. Birokrasi Pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dimana dalam perkembangan otonomi tidak hanya mengarah kepada “political aspect” semata, tetapi juga memperhatikan “economic aspect” sebagai basis atau landasan mengurus rumah tangganya sendiri<sup>33</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam pelayanan publik juga tidak hanya didekati dari suatu aspek saja, misalnya aspek hukum atau aspek politik saja. Tetapi juga melingkupi aspek

---

<sup>33</sup>Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., *Membangun Negara Hukum di Indonesia* (Makassar: Phinatama Media, 2014) hlm. 132

ekonomi dan aspek sosial budaya secara integratif<sup>34</sup>. Dalam perspektif ekonomi pelayanan publik adalah sebuah bentuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (sektor publik yang diperlukan oleh warga negara sebagai konsumen). Pengadaan barang dan jasa ini harus disediakan oleh pemerintah, ini karena sektor swasta tersebut tidak mau memproduksi barang dan jasa tersebut sebagai konsekuensi dari kegagalan pasar atau karena secara alamiah barang atau jasa tersebut harus disediakan secara eksklusif oleh Negara<sup>35</sup>. Sedangkan dalam perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka pelayanan publik dapat diartikan sebagai seperangkat norma hukum tentang pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara yang dituangkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan warga negara sebagai penerima layanan publik secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Pelayan publik dari sisi hukum diletakkan pada jaminan konstitusi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :

---

<sup>34</sup>Dr. Sirajuddin, S.H., M.H., Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum., dan Windardi, S.H., M.Hum., *Hukum Pelayanan Publik berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi* (Malang: Setara Press, 2012) hlm. 11

<sup>35</sup>Tim Peneliti Lemlit UI, 2002. *Naskah RUU Tentang Pelayanan Publik*, Jakarta: Lemlit UI, hlm.4



*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* dan ayat (3) yang berbunyi : *“Setiap warga negara berha memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*. Sehingga dalam perspektif konstitusi, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara dalam pemerintahan daln pelayanan public (lihat juga Pasal 28 I ayat 4 dan 5, Pasal 28H, Pasal 34 ayat 2 dan 3).

Kegiatan pelayanan publik untuk memenuhi hak warga negara dan penduduk tersebut diatur dalam berbeagai peraturan perundang-undangan. Secara garis besar peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang mengatur pelayanan publik dari dimensi:

1. Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Pembinaan dan penataan pelayanan publik;
4. Hak, kewajiban dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja

6. Peran serta masyarakat;
7. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan;
8. Sanksi.<sup>36</sup>

Kemudian dalam ketentuan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan definisi pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

---

<sup>36</sup>Penjelasan UU Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*

4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.<sup>37</sup>

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan oleh Aparatur Pemerintah adalah pelayanan publik. Untuk dapat memberikan pelayanan public (public service) dengan baik maka Pemerintah Daerah harus memiliki sumber sumber keuangan yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi keuangan Pemerintah Daerah inilah yang akan menentukan kemampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang menyangkut pelayanan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana serta perlindungan masyarakat.

Jika suatu daerah mempunyai pengelolaan yang baik yang berasal dari pajak dan retribusi daerah maka tidak mustahil jika pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat. Namun rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah akan menimbulkan efek negatif yaitu rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat dalam pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan oleh publik

---

<sup>37</sup>Dr.Ir.H.Juniarso Ridwan, M.Si. dan M.H. Achmad SodikSudrajat, S.H., M.H, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009), hlm.20

(masyarakat) tentunya dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini, pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang dan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang. Alasan penulis memilih kedua tempat tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan yakni:

1. Dinas Pariwisata dan Olahraga Kab. Pinrang memiliki tugas satu diantaranya yakni melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang sebagai suatu badan yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

Olehnya itu penulis memilih kedua lokasi tersebut karena berkompeten dalam menunjang kebutuhan data pada penelitian ini.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas , yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945;
  - b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh UUD Negara RI Tahun 1945;
  - c. Peraturan Perundang-undangan:
    - 1) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
    - 2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
    - 3) Keputusan/Peraturan Menteri dan peraturan yang setaraf
    - 4) Peraturan Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.

Selanjutnya, sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (*literature research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (interview) langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian ini.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin di timbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Dalam praktik pemerintahan di Indonesia perizinan di kategorikan sebagai pemberian pelayanan, sehingga di kerjakan oleh birokrasi yang memberikan pelayanan umum. Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus di tempuh oleh seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan izin tertentu yang di dasari oleh berbagai perangkat hukum. Mekanisme, prosedur, dan perangkat hukum yang mendasari tidaklah bersifat netral, melainkan disusun untuk melayani tujuan tertentu misalnya efisiensi, keadilan, pemerataan.<sup>38</sup>

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang di anjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkrit. Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang di hadapi. Keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini.

---

<sup>38</sup>Adrian Sutedi,S.H., M.H., Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika,2015),hlm.2

## **A. Pelaksanaan Proses Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang**

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata khususnya usaha daya tarik wisata di Kota Pinrang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi Kota Pinrang. Hal ini menjadi salah satu dampak positif dari penyelenggaraan usaha pariwisata. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya usaha daya tarik wisata juga memiliki dampak sosial lain bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena usaha daya tarik wisata merupakan jenis usaha berskala besar yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pinrang menerbitkan aturan-aturan khusus dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, mulai dari proses pengajuan izin usaha sampai kajian teknis pelaksanaan usaha pariwisata tersebut.

Dasar Hukum penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Pinrang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2016 Tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah Kota Pinrang memberikan syarat-syarat khusus, ketentuan, dan larangan-larangan yang harus dipenuhi oleh pelaku yang ingin menyelenggarakan usaha pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2016 Tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata, penyelenggaraan usaha pariwisata berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang (DISPASPOR). Dalam hal ini Dinas Pariwisata

merupakan Dinas Teknis yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan kajian teknis menyangkut kelayakan penyelenggaraan Pariwisata.

Usaha daya tarik wisata masuk ke dalam ruang lingkup usaha pariwisata seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2016 Tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata. Oleh karena itu, penyelenggaraan usaha pariwisata harus memiliki Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP.

Adapun ruang lingkup usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang sesuai dengan di aturnya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata antara lain :<sup>39</sup>

1. Daya Tarik wisata;
2. Kawasan pariwisata;
3. Jasa transportasi wisata;
4. Jasa perjalanan wisata;
5. Jasa makanan dan minuman;
6. Penyediaan akomodasi;
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. Jasa informasi pariwisata;

---

<sup>39</sup>Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

10. Jasa konsultan pariwisata;
11. Jasa pramu wisata;
12. Wisata tirta; dan
13. Spa.

setiap pelaku usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana ditentukan pada pasal 2 yang bertujuan untuk :<sup>40</sup>

- a. menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisatanya.
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata.
- c. Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Penerbitan izin TDUP dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Namun untuk dapat menerbitkan izin TDUP, Badan Perizinan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Pinrang.

Seperti yang dinyatakan oleh Wardia dari Badan Perizinan Terpadu dalam wawancara yang dilakukan penulis:<sup>41</sup>

---

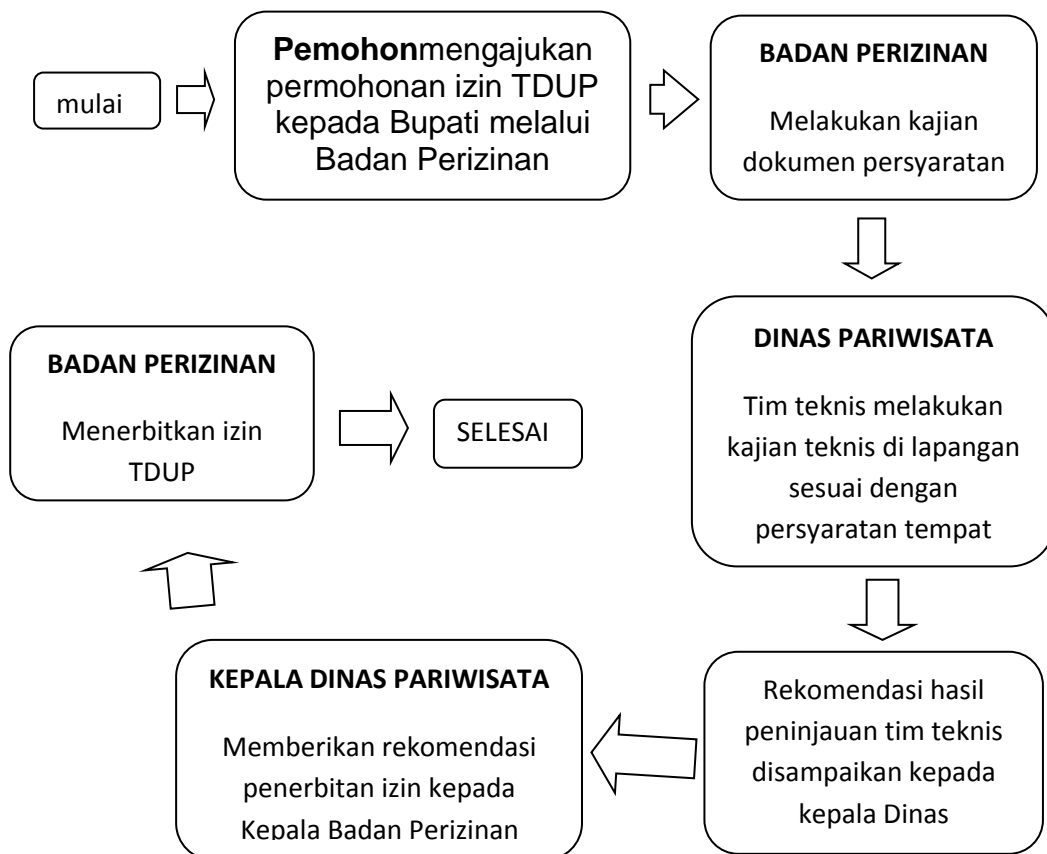
<sup>40</sup>Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

<sup>41</sup>Wawancara dengan Ibu Wardia, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang pada tanggal 9 maret 2017

*“Semua izin yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan merupakan rekomendasi dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Dalam hal usaha Pariwisata, maka jenis izinnnya adalah izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Badan perizinan bisa menerbitkan TDUP jika pemohon memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata.”*

Alur atau prosedur pengajuan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dilihat pada bagan di bawah ini<sup>42</sup>:

#### Alur Pengajuan Permohonan Izin TDUP



Sumber: Data diolah dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang

<sup>42</sup> Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang, dalam penelitian yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2017

Untuk dapat mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebelumnya pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang diajukan pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pariwisata dan Badan Perizinan, antara lain pemohon harus sudah memiliki<sup>43</sup> :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Izin Lingkungan (AMDAL)

Khusus untuk surat izin Lingkungan, usaha daya tarik wisata memang membutuhkan hal ini karena usaha daya tarik wisata memiliki konsekuensi atau resiko tinggi akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan adanya aktivitas pembangunan sarana dan infrastruktur . Maka dari itu pemohon harus terlebih dahulu sudah memiliki surat izin lingkungan (AMDAL).

Setelah penerbitan TDUP, lebih lanjut dalam pengurusan izin usaha dalam bidang pariwisata dilaksanakan oleh dinas perizinan khususnya di Kabupaten Pinrang berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dimana Peraturan Bupati tersebut memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya pada pasal 9 ayat 3 untuk

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Anwar, Kepala Bidang Pengembangan Usaha & Pemasaran Kepariwisata, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 8 maret 2017

menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur. Kemudian dari amanah yang diberikan oleh Peraturan Bupati tersebut, sehingga DPMPTS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) selaku Dinas yang menaungi tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah disusun kepada calon pelaku usaha. Dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat oleh DPMPTS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) maka untuk memperoleh izin usaha khususnya di Kabupaten Pinrang harus memenuhi beberapa persyaratan dalam pelayanan penyelenggaraan perizinan.

Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Pinrang, syarat dalam penyelenggaraan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Pinrang untuk izin usaha pariwisata, yaitu:

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDUP);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha;
4. Surat pernyataan formulir telah diisi dengan benar dan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala lingkungan/Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan camat setempat;

6. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.

Adapun kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Rekaman KTP/SIM/PASPOR sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Pas Foto warna 3 X 4 12 (dua belas) lembar;
3. Fotokopi keseluruhan berkas sebanyak 1 (satu) rangkap.

Setelah kelengkapan berkas terpenuhi, pihak dari DPMPTS memberikan formulir permohonan perizinan bagi calon pelaku usaha pariwisata. DPMPTS memberikan formulir permohonan perizinan yang terbagi atas dua pelayanan yaitu:

- a. Pelayanan perizinan usaha;
- b. Perizinan penanaman modal.

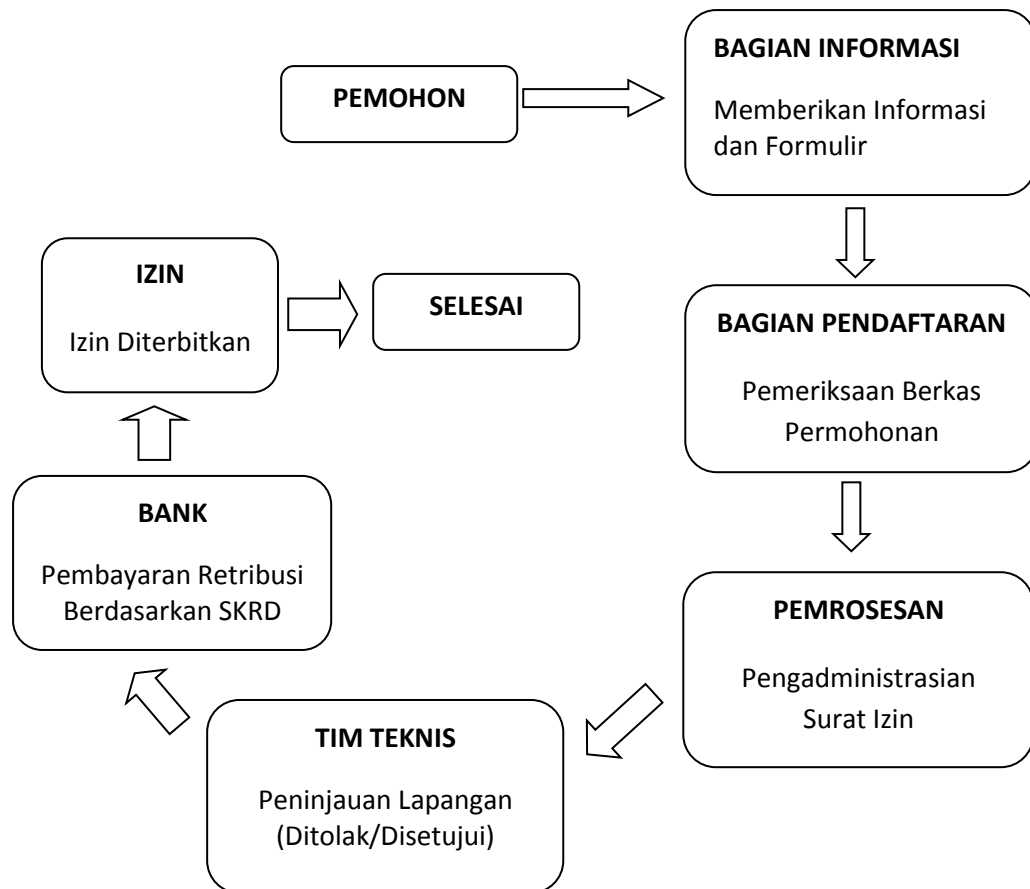
Setelah seluruh kelengkapan berkas telah terpenuhi, adapun mekanisme yang harus di lalui calon pelaku usaha. Untuk mekanisme penyelenggaraan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menentukan standar yang dapat di lihat dalam uraian berikut:

Mekanisme Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang ,dalam penelitian yang dilakukan pada tanggal 9 maret 2017





Tahapan tata cara penerbitan izin sesuai dengan mekanisme yang telah di terapkan oleh DPMPTSP :

1. Pemohon mendatangi bagian informasi untuk memperoleh informasi seputar izin yang akan di butuhkan beserta syarat-syaratnya;
2. Bagian informasi memberikan formulir pendaftaran untuk diisi oleh pemohon;
3. Pemohon mengajukan formulir pendaftaran dan berkas permohonan di loket pendaftera;
4. Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan, berkas yang lengkap akan diregistrasi dan

selanjutnya pemberian nomor register dan tanda terima sedangkan berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

5. Loker Pelayanan (Seksi Administrasi Pelayanan dan Perencanaan Perizinan) akan mengadakan validasi dokumen berkas, jika dinyatakan valid maka dijadwalkan untuk mengadakan rapat dan peninjauan lapangan Tim Teknis.
6. Sub Bagian Tata Usaha membuat surat tugas peninjauan lapangan.
7. Tim Teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan mengadakan Rapat Tim Teknis, apabila :
  - a. Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam rekomendasi Tim Teknis.
  - b. Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan dikembalikan disertai surat alasan yang diketahui oleh Tim Teknis.
8. Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya berupa BAPL, SKRD dan SSRD di Loker Pelayanan untuk diproses lebih lanjut.
9. Selanjutnya Loker Pelayanan melakukan input data dan pencetakan naskah surat izin.

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan koreksi dan paraf Surat Izin.

11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melakukan penandatanganan surat izin.

12. Pemohon melakukan pembayaran Retribusi di Loker Bank Sulsel berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dari tim teknis.

13. Pemohon menerima Surat Izin di Loker Penyerahan Izin

Dalam wawancara dengan Ibu Satriani salah seorang aparat pelayanan perizinan bagian informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang bertugas di bagian pendaftaran dikutip<sup>45</sup>:

*“Mekanisme pelayanan perizinan di kantor kami sebenarnya sudah sangat jelas dan mudah. Cukup hanya dengan mendatangi DPMPTSP saja, di bagian informasi pemohon sudah diberikan informasi-informasi penting oleh petugas dan di bantu untuk mengisi formulir pendaftaran. Selebihnya kami yang bertugas bagian pendaftaran cukup memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang dilampirkan pemohon dalam formulir pendaftaran. Namun kadang masih ada kekurangan dalam berkas permohonan atau juga kami dapatkan pemohon yang di wakili oleh orang lain, padahal hal ini tentu dapat menghambat permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon”.*

Dalam mekanisme pelayanan perizinan di DPMPTSP masyarakat cukup langsung mendaftarkan diri untuk mengajukan perizinan yang dibutuhkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Ibu Satriani, bagian informasi, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang pada tanggal 9 maret 2017

Terpadu Satu Pintu, kemudian pemohon menunggu kedatangan tim teknis untuk meninjau lokasi bangunan maupun lokasi usaha pemohon. Tim teknis juga yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan perizinan yang diajukan oleh masyarakat. Setelah semua pengolahan dokumen yang dilaksanakan di DPMPTSP selesai, pemohon cukup mendatangi tempat yang sama untuk membayar retribusi bangunan atau tempat usahanya berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh tim teknis, karena di dalam DPMPTSP sendiri telah disediakan loket pembayaran Bank Sulselbar. Setelah itu masyarakat dapat mengambil surat izin yang mereka butuhkan di loket penyerahan izin.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Anwar dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis<sup>46</sup>:

*“Dengan panjangnya prosedur untuk memiliki izin TDUP bagi usaha pariwisata, diharapkan penyelenggaraan usaha pariwisata tidak keluar dari jalur aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tidak bisa dipungkiri masih ada temuan yang didapatkan di lapangan bahwa adanya usaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha tidak sesuai izin dan menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa melalui proses perizinan”*

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa terdapat prosedur yang cukup panjang dan ketat untuk dapat memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang merupakan izin untuk menyelenggarakan usaha pariwisata. Proses perizinan yang cukup panjang ini merupakan salah

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Anwar, Kepala Bidang Pengembangan Usaha & Pemasaran Kepariwisata, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 8 maret 2017

satu unsur pengendalian penyelenggaraan usaha yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 . Dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perbup tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan usaha pariwisata menjadi terkendali dan berada dalam jalur yang benar agar dapat menjadi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pinrang, bukan malah menjadi permasalahan baru dan membawa efek negatif dalam kehidupan sosial masyarakat.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Pinrang**

### **1. Factor hukum**

Dasar Hukum penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha pariwisata mulai dari hak dan wewenang pihak penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pinrang, Penyelenggara Usaha, sampai dengan masyarakat sebagai konsumen usaha pariwisata. Walaupun demikian, pemerintah Kabupaten Pinrang masih perlu membentuk suatu aturan khusus yang lebih jelas mengatur mengenai hak dan wewenang Dinas Pariwisata untuk mengawasi, mengendalikan, dan membina segala jenis usaha pariwisata karena selama tahun 2016 ada beberapa upaya pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang yang menyelenggarakan usaha pariwisata tapi tidak

sesuai prosedur yang telah di tentukan oleh pemerintah. Hal ini perlu di perhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang agar masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata menyelenggarakan usahanya tidak keluar dari aturan yang telah di tentukan.

## 2. Penegakan Hukum

Soerjono Sokanto berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.<sup>47</sup> Selain pengawasan dalam izin usaha, efektivitas dalam penegakan hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penyelenggaraan izin usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang. Penegakan hukum perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha pariwisata. Pemerintah Kabupaten Pinrang memegang peranan utama dalam mewujudkan penyelenggaraan usaha pariwisata yang sesuai dengan tujuan Perda tersebut. Dengan melakukan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata, yang sesuai ketentuan maka pemerintah dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk perkembangan usaha dan masyarakat Kabupaten Pinrang secara keseluruhan.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto *op.cit.*, hal.19

Berdasarkan hal ini, pemerintah Kabupaten Pinrang sudah menjalankan fungsinya yaitu dengan menjalankan prosedur penyelenggaraan dan penerbitan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dilakukan melalui Dinas Perizinan yang diberikan rekomendasi oleh Dinas Pariwisata. Semua pihak yang ingin menjalankan usaha pariwisata harus mendaftarkan usahanya di Dinas perizinan dan mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata melalui dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang.

Selain Penerbitan TDUP, Pemerintah Kabupaten Pinrang yang diamanatkan oleh Perda adalah mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan usaha Pariwisata sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat 1 Perda Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa :

“Kepala SKPD melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran kepariwisataan”

Maka dari itu untuk menjalankan tugas tersebut pemerintah Kabupaten Pinrang harus melakukan pengawasan terhadap segala jenis usaha pariwisata Secara umum, pemerintah Kabupaten Pinrang perlu membentuk tim dalam melakukan penegakan hukum perizinan usaha pariwisata. Hal tersebut kemudian yang tidak diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pinrang mengenai pariwisata. Kepala SKPD Pariwisata yang pasif dalam penyelenggaraan pengawasan daftar usaha pariwisata menyebabkan perlunya tim dalam upaya penegakan Perda

tersebut. Namun kurangnya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengawasi usaha pariwisata yang tidak memiliki TDUP sehingga efektifitas pelaksanaan izin usaha pariwisata masih belum optimal.

### 3. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, penulis menemukan adanya pelanggaran dalam hal penyelenggaraan usaha pariwisata dan salah satu yang penulis ingin bahas dalam skripsi ini yakni penerbitan izin usaha pariwisata di kabupaten pinrang. Menurut Soerjono Soekanto Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>48</sup> Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bachtiar Selaku kepala Dinas Parawisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang menyebutkan Bahwa<sup>49</sup>

“Pembentukan dinas parawisata dan olahraga secara resmi awal tahun 2016, oleh karena itu pembangun kantor dan sarana lainnya masih dalam proses yang belum rampung dan masih dalam proses pembenahan”

Menurut penulis dengan kurangnya sarana dan prasarana di Dinas Pariwisata seperti tanda, petunjuk, dan papan informasi terkait prosedur penerbitan TDUP sehingga minimnya informasi kepada masyarakat

---

<sup>48</sup>*ibid*.hal. 37

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Bachtiar, Kepala Dinas Pariwisata, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 8 maret 2017



tentang penerbitan TDUP yang perlu di miliki oleh para pelaku usaha pariwisata. Pemerintah kabupaten pinrang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Olahraga perlu segera melengkapi sarana dan prasarana agar dapat mengontrol pelaksanaan proses kegiatan administrasi yang dilakukan masyarakat di bidang pariwisata.

#### 4. Faktor Masyarakat

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dari jumlah keseluruhan penyelenggaraan usaha daya tarik wisata di Kabupaten Pinrang, masih adanya pelanggaran-pelanggaran usaha seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>51</sup>

No	Usaha Pariwisata	Jumlah
1	Memiliki Izin TDUP	7
2	Pelanggaran	3

Sumber: Data Primer 2016

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah total pelanggaran izin usaha pariwisata yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 3 pelanggaran. Jumlah pelanggaran ini terbilang sangat signifikan yang terjadi pada tahun 2016 , yaitu sekitar seperempat atau dua puluh lima

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto *Op.cit.* hal.45

<sup>51</sup>Data pelanggaran dari hasil wawancara di Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang pada tanggal 8 maret 2017

persen (25%) jika dibandingkan dengan total penyelenggaraan pariwisata yang memiliki izin lengkap sebanyak 7 usaha pariwisata. Bertambahnya jumlah pelanggaran ini menjadi tanda bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi terkait penyelenggaraan usaha pariwisata.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Bachtiar dari Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang, beliau mengakui bahwa<sup>52</sup>:

“sepanjang tahun 2016 memang terjadi beberapa pelanggaran yang ditemukan dilakukan oleh penyelenggara usaha pariwisata, ada beberapa pelaku usaha pariwisata memiliki lahan dan telah melakukan pembangunan akan tetapi pelaku usaha tersebut menyelenggarakan usahanya tanpa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu ”

dari keterangan diatas , realitanya masih ada beberapa masyarakat yang tidak paham dan tidak menghiraukan prosedur dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. Salah satu contoh kasus yang diungkapkan adalah temuan salah satu usaha pariwisata yang membangun dan menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa memiliki izin pada tahun 2016, yaitu objek wisata Karomba yang berlokasi di Kecamatan Lembang Desa Sali-Sali Kabupaten Pinrang. Objek wisata karomba muncul pada awal tahun 2016 yang marak di publikasikan ke media oleh masyarakat setempat sehingga banyaknya pengunjung wisata berdatangan dari luar daerah Kabupaten Pinrang untuk menikmati destinasi wisata Karomba. Masih ada kemungkinan usaha pariwisata lainnya yang tidak memiliki

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Bachtiar, Kepala Dinas Pariwisata, di Dinas Pariwisata dan Olahraga pada tanggal 8 maret 2017

izin yang belum terpantau oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur izin usaha pariwisata sehingga masih adanya beberapa pelaku usaha pariwisata yang sewenang-wenangnya menyelenggarakan usahanya tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan.

Penulis juga menemukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang juga belum membentuk suatu SOP(standar oprasional prosedur) tentang mekanisme pelayanan administrasi kepada masyarakat, hal ini dapat yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengurusan izin usaha pariwisata. Selain itu, di Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang tidak terdapat data yang lengkap mengenai penyelenggaraan dan pelanggaran usaha pariwisata sebelum tahun 2016. Hal tersebut berdampak buruk bagi pelaku usaha pariwisata, sehingga pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan izin usaha pariwisata masih kurang dan mengakibatkan masyarakat cenderung mendirikan usaha pariwisata tanpa melalui proses perizinan yang telah ditentukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang sudah berjalan dengan baik, namun masih ada temuan yang didapatkan dengan adanya pelaku usaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha secara ilegal tanpa melalui proses perizinan. Ini di karenakan masih kurangnya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan yang di lakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pinrang.
2. Adanya pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang yang tidak memiliki izin karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang antara lain :
  - a. Factor hukum, Pemerintah kabupaten pinrang belum mengeluarkan aturan khusus yang secara jelas mengatur mengenai pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha pariwisata.

- b. Penegakan hukum, pemerintah Kabupaten Pinrang perlu membentuk tim dalam melakukan penegakan hukum perizinan di bidang usaha pariwisata.
- c. Sarana dan fasilitas pendukung, kurangnya sarana dan prasarana di Dinas Pariwisata seperti tanda, petunjuk, dan papan informasi terkait prosedur penerbitan TDUP sehingga minimnya informasi terhadap masyarakat tentang penerbitan TDUP yang perlu di miliki oleh para pelaku usaha pariwisata
- d. Kesadaran masyarakat, Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang juga belum membentuk suatu SOP(standar oprasional prosedur) tentang mekanisme pelayanan administrasi kepada masyarakat, hal ini dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengurusan isin usaha pariwisata.

## **B. Saran**

1. Perlunya peningkatan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap penyelenggara usaha pariwisata yang ilegal. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata yaitu lebih sering turun ke lapangan, sekaligus melakukan sosialisasi Perda tentang pariwisata kepada masyarakat.
2. Perlunya peraturan khusus yang mengatur tugas dan wewenang dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang dan mengeluarkan SOP yang

bisa mengakomodir pelaku usaha pariwisata mulai dari tahap perizinan sampai dengan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pariwisata di Kabupaten Pinrang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Adrian Sutedi, 2015. Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik.

Jakarta: Sinar Grafika

Aminuddin Ilmar, 2014. Membangun Negara Hukum di Indonesia.

Makassar: Phinatama media

Bachan Mustafa, 2010. Sistem Hukum Administrasi Negara. Bandung: Citra

Aditya Bakti

H. Juniarso Ridwan Dkk, 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan

Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa Cendekia

HR Ridwan, 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pres

Juniarso Ridwan DKK, 2012. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan

Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa

Nyoman S. Pendit, 1986. Ilmu Pariwisata, sebuah pengantar perdana.

Jakarta: Pradnya Paramita

Prajudi Atmosudirdjo, 2010. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan.

Surabaya: Gramedia

Ida Bagus Wiyasa P, 2001. Hukum Bisnis Pariwisata. Bandung: Refika

Aditama

Sirajuddin Dkk, 2012. Hukum Pelayanan Publik berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi. Malang: Setara Press

W.F. Prins Dkk, 1982. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara.  
Jakarta: Pradnya Paramita

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2  
tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Pinrang.



### **C. Internet**

<https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1326> diakses pada 15 Februari 2017  
pada pukul 00.09 wita.

[www.TribunTimur.com](http://www.TribunTimur.com), Diakses pada 22 Desember 2016,  
<https://polemik.wisata.karomba.pinrang>

<http://assharrefdino.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017 jam  
11.30 WITA

<http://totoksuharto.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017 jam  
11.30 WITA